

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme & abolisonisme)*, Bandung : 1996, Binacipta.

Ardana, Komang, dkk. 2008. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

_____, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PPB Menentang Korupsi Tahun 2003*.

Amrah Muslimih, *Beberapa Asas Dan Pengertian 'Pokok' Tentang Administrasi Dan Hukum Administrasi*, Alumni Bandung, 1985.

Anton Wibisono, *Determinen Intensi Pelaporan Pelanggaran: Studi Empiris Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis 21 (2), 2018.

Aryas Adi Suyanto, *Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal USM Law Review 1 (1), 2018.

Asshiddiqi Jimly, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UI Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 90-91.

Aji Setioko, *Pengambilan Keputusan Dalam Perilaku Organisasi*. UNNES (Universitas Negeri Semarang), 2010.

Basah, Sjachran, (1989), *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm, 12.

Davis Gordon B, *Management Information Systems: Conceptual Fondations, Structure, and Development*, Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, 1974; Terj. Adiwardana, Andreas S, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I: Pengantar*, Jakarta, PT. Pustaka Binaman Pressindo, 2002, Cet. Ke-12.

Djaja Ermansjah, "Memberantas Korupsi Bersama KPK", Balikpapan, Sinar Grafika, 2008.

Fred Luthns, *Perilaku Organisasi*. Penerjemah Andhika Yuwono, Yogyakarta: Andi, 2005.

- Hamzah, Andi, (1991), *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pencegahannya*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*, Edisi Kedua. BPFE: Yogyakarta. 2000.
- Hamidi, Jazim, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).*
- Hatta, Moh. (2014), *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta ; Liberty.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, (Bandung : Nusa Media, 2016). Hlm. 72.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014).
- Indroharto, *Pengawasan Terhadap Perbuatan-Perbuatan Dalam Pemerintahan, Saduran atas buku Mr. DR. A.Q.C. TAK, yang ' berjudul "Overheidsbestuur en Privaatrecht", tidak dipublisir, 1984.*
- Jain MP, *Develoment of Administative Law In Malaysia Since Merdeka*, dimuat dalam " The Malaya Law Journal Supplement", 1977.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catalan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni Bandung, 1978.
- Luthns, Fred, *Perilaku Organisasi Penerjemah Andhika Yunwono*, (Yogakarta: Andi), 2005.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial* (Bandung : Nusa Media, 2017. Hlm. 93.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Anggaran Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi, Muatan)*. Hlm. 78 (Kanisuis 2017).
- Marbun, SF, *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia*, (Bandung, 2001).
- Moch. Faisal (2004), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Jakarta. Notohamidjojo, *Negara Hukum*, BPK, Jakarta, 1978.

- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Prajudi 'Atmosudirdjo, *'Hukum Administrasi –' Aegaraj Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1981.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, 'Mumm, Bandung, 1973.
- Sudjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1978.
- Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule Of Law Itu*, Alumni Bandung, 1976.
- Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni), 1992.
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis UNPAD XXIX, 24 September 1986*. L. :, *Beberapa Permasalahan Pokok Sebelum Realisasi Efektif Pengadilan Administrasi, Dimuat dalam "Bunga Rampai HTN. Dan HAN..FH UII*, 1978.
- Utrecht, 'E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH UNPAD, 1960.
- Usmara. 2005 *Hnadbook of Organizations, Kajian dan Teori Organisasi*. Yogyakarta. Penerbit : Amara Books.
- Robbins. Stepen P. 2003. *Manajemen. Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Indeks.
- Sibuea, Hotma P (2020), *Dinamika Negara Hukum*, Depok : Rajawali Pers.
- _____, dan Dwi Seno Wijanarko. (2020), *Dinamika Negara Hukum*. Depok. Rajawali Pers.
- _____, (2010), *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Bik*, Penerbit Erlangga.
- _____, (2014), *Ilmu Negara*, Jakarta : Erlangga.
- Soerjono, Soekanto (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Pembangunan Indonesia*, Jakarta : UI-Press.

Sunggu, Tumbur Ompur (2012), *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Total Media salam, Watch Indonesia Corruption, et al (2009), *Naskah Akademik (Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-Usul Inisiatif Masyarakat)*, Jakarta, Indonesia. Cipta 2003.

Suratno, Sadhu Bagas, “*Pembentukan Peraturan Kebijakan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*”, E-Journal Lentera Hukum, 4.3,164 <http://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>.

Syuhudi, Ichsan, “*Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*”, 17.1 (2017), hal. 10-19.

Wilson Gunawan Salim, *Kepastian Hukum Terhadap Tidak Dilaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Penyeleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Corruption Universitas Lampung I (1), 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Kitab *Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* terjemahan R. Soesilo.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR,1998 *tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

_____,Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

_____,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 *Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

_____,Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 *Tentang Pejabat Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

_____,Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*.

_____,UU Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang “Pelayanan Publik”*.

C. Karya Ilmiah

Miracle M.A.A.S. Sihombing, *Laporan Kuliah Kerja Lapangan, Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Laporan KKL tidak diterbitkan, Malang Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Marcus Lukman, Freies Ermessen, *Dalam Proses Perencanaan Dan Pelaksanaan Rencana Kota di Kotamadya Pohtianak*, Tesis Magister pada Fakultas Pasca Sarjana UNPAD, tidak dipublisir,-1989.

D. Jurnal Hukum

Zainal Putra, “*Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sistem E-LHKPN di Lingkungan Universitas Teuku Umar*”, Jurnal ADIMAS 4 (1), 2020. DOI : 10.24269/adi.v4i1.2301.

Yuniarty Veronica Ingnuan, Mohamad Lutfi, *Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*, Jurnal EKOBIS 8 (2), 2018. DOI : 10.37932/j.e.v8i2.43.

Anton Wibisono, “*Determinan Intensi Pelaporan Pelanggaran : Studi Empiris Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 21 (2), 2018. DOI : 10.24914/jeb.v21i2.1985.

Widjiastuti, Agustin, “*Peran Aupb Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN*”, Prespektif, 22.2 (2017), 96-110 <http://jurnalperspektif.org/index.php/perspektif/article/view/614>.*

Faiq Tobroni Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta *Asistensi Pengisian LHKPN Untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan Dan Akuntabel*

Jurnal BPPK Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018 Halaman 28-55, *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*

.

E. Artikel

Nurhayati Lilis (2017), “*Sistem Pendukung Keputusan*”. Seminar Nasional. Tekno.Inf. dan Multimedia, 2016, Cited by 7 related Articles.

F. Internet

Deni Marmos., 2011, Korupsi (online), <http://denimarmos.Blogspot.com/2011/09/korupsi.html> (Jumat, 18 Juli 2021

